

**“Kemanakah Hutan Kami ?”**  
**Dinamika Sosial dan Kontestasi Antara Pihak-pihak yang**  
**Terlibat dalam Pengelolaan Hutan di Kabupaten Seruyan**  
**Kalimantan Tengah**

Oktovianus Rusmin

*Lembaga Sertifikasi PT. Mutuagung Lestari, Jakarta*

**Abstract**

*Social dynamics in forest management is quite complicated. The locals are the hereditary lived in adjacent of forest area and use it for supporting their daily need. The timber and mining company exploited of forest for earning of profit. The government stands in the crossroad, they must manage the forest for conservation area while at the other hand they must increase the regional income.*

*The euphoria of reformation has encouraged the Regional Autonomies (decentralization) and has rolled over of new policies by the regional government in term of the natural resources management. Despite the regional government is now concerning the locals who their needs are depend on the forest but the conflict lie where the people with different interest meet. In this case, it talks about forest exploitation, the locals are the misfortune one.*

*The article shall describe the social dynamic and the contested among parties related to the forest management in Seruyan District Province of Central Kalimantan.*

**Keywords: Deforestation, Contested, Sustainable, Indigenous people.**

## Pendahuluan

Hutan di Indonesia merupakan sumber daya alam yang amat penting dan strategis, yakni sebagai suatu sistem penyangga kehidupan dengan tiga fungsi utamanya, meliputi: fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produktif. Fungsi-fungsi tersebut dengan jelas telah diatur dan ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Ketiga fungsi tersebut memiliki hubungan timbal-balik dan saling terkait. Oleh karena itu, pengelolaan fungsi tersebut amat penting, demi tercapainya optimalisasi fungsi secara berkelanjutan (*sustainable*).

Dalam kerangka tersebut di atas, maka selayaknya jika pembangunan kehutanan yang dikembangkan merupakan pergeseran kebijakan dari *timber management* ke *multi purpose* dan *multi functions management* yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Masyarakat lokal yang bermukim di sekitar wilayah hutan, sebagian besar menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan untuk mempertahankan kehidupan sehari-harinya. Gambaran masyarakat lokal di pedalaman Kalimantan, Papua dan beberapa tempat lainnya di Indonesia, memperlihatkan kepada kita bahwa kebiasaan berburu dan mengumpulkan/meramu hasil-hasil hutan (*hunters and gathering*), terutama untuk bahan makanan dan kayu bakar, serta aktivitas berladang

sebagai sumber mata pencaharian utama. Aktivitas tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan masih bisa kita jumpai dalam kehidupan masyarakat sekitar hutan, utamanya masyarakat lokal dan/atau penduduk asli (*indigenous people*). Bagi kelompok masyarakat tersebut, hutan menyediakan pangan dan sumber penghasilan lainnya yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari.

Setelah bertahun-tahun hutan dikelola dengan cara-cara yang kurang mempertimbangkan aspek kelestarian di bawah sistem pemerintahan yang terpusat (*sentralisasi*), sekarang ini Indonesia telah memasuki era baru, dimana pengelolaan sumber daya alam tersebut beralih kepada kendali pemerintah daerah. Kondisi obyektif Pulau Kalimantan yang memiliki kawasan hutan terluas di Indonesia, secara signifikan menempatkan sektor kehutanan menjadi salah satu pilihan strategis dan sebagai salah satu sektor andalan yang sangat potensial dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah menjadi komitmen bersama secara nasional.

Perubahan sistem pengelolaan hutan dari *sentralisasi* kepada *desentralisasi*, merupakan potensi bagi pemerintah daerah untuk memperoleh keuntungan yang amat besar terutama untuk maksimalisasi pendapatan daerah (*regional income*) dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya,

utamanya masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hutan. Secara teoritis, penguasa setempat akan lebih memahami kondisi wilayahnya sehingga akan membuat berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, terutama untuk kelompok masyarakat yang selama ini termarjinalkan dan kurang memiliki akses serta kalah bersaing dalam pemanfaatan hasil-hasil hutan. Namun, kenyataannya bahwa desentralisasi kewenangan pengelolaan hutan tersebut merupakan suatu proses yang sangat kompleks, menyisakan dan bahkan melahirkan persoalan-persoalan baru.

Terjadinya penurunan kualitas sumber daya alam, terutama sumber daya hutan di Pulau Kalimantan, merupakan pemandangan nyata yang ada di hadapan kita. Secara khusus di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, di mana terdapat berbagai pihak yang memiliki akses dalam pengelolaan hutan. Pihak-pihak tersebut terdiri dari Unit Manajemen yang memiliki izin pengelolaan Hutan Alam (HPH) dan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Perkebunan Kelapa Sawit, usaha-usaha penggergajian kayu (sebagian besar dikelola oleh pihak pendatang), serta penambang-penambang tradisional yang tidak memiliki izin resmi. Keberadaan berbagai pihak tersebut telah meninggalkan dampak yang besar terhadap kondisi sumber daya alam setempat, terutama hutan. Kualitas

hutan yang merupakan sumber daya penting bagi masyarakat setempat, telah mengalami degradasi dan bahkan mengarah pada kondisi "*tragedy of the commons*" (lihat Gordon, 1954; Scott, 1955; Hardin, 1968). Dalam kondisi seperti itu, masyarakat lokal yang pada umumnya hidup secara tradisional di sekitar wilayah hutan, seringkali menjadi pihak yang termarjinalkan dalam ranah persaingan dengan berbagai pihak.

Munculnya resistensi dari masyarakat lokal, terutama masyarakat adat yang bermukim di sekitar wilayah hutan, merupakan proses dialektika dari adanya kepentingan-kepentingan berbagai pihak dengan kepentingan masyarakat lokal yang merasa bahwa akses dan hak-hak mereka terhadap hutan semakin terdesak oleh karena terjadinya *deforestasi* pada sumber daya penting tersebut (lihat Peluso, 1992).

Gambaran di atas merupakan pijakan awal tulisan ini yang akan mencoba memaparkan dinamika sosial dan persaingan berbagai pihak dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.

### **Pengelolaan Hutan: "*Hutan untuk Masyarakat, Hutan untuk Peningkatan Pendapatan Daerah atau Hutan untuk para Konglomerat ?*"**

Sejarah pemanfaatan hutan di Kalimantan Tengah telah dimulai sejak lebih dari setengah abad lalu,

yaitu dengan dimulainya kegiatan eksploitasi kayu agathis secara sederhana menggunakan sistem panglong/tebang banjir di daerah Sampit dan sekitarnya yang dilaksanakan oleh NV. BRUINZEEL. Setelah Indonesia memasuki era kemerdekaan, kegiatan eksploitasi dan pengelolaan hutan di Kalimantan Tengah selanjutnya diambil alih oleh PT. SAMPIT DAYAK dan PN PERHUTANI. Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh kedua badan usaha tersebut terus berlanjut hingga memasuki era Orde Baru. Karena tuntutan kebutuhan, pada dekade tahun 1970 PN PERHUTANI selanjutnya direstrukturisasi menjadi PT. INHUTANI III. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk pembangunan, memasuki era tahun 70-an, kegiatan eksploitasi hutan di Kalimantan Tengah tidak lagi sebatas dilaksanakan oleh PT Inhutani, tetapi telah melibatkan perusahaan swasta lainnya dengan terbukanya peluang untuk memperoleh konsesi HPH dalam skala luas ([www.eu-ilrc.or.id](http://www.eu-ilrc.or.id), 2005).

Selama masa kekuasaan rezim Orde Baru, pemerintah telah memberikan hak istimewa kepada pengusaha-pengusaha atau konglomerat yang dekat dengan pihak penguasa. Kawasan HPH yang luasnya sekitar 64 juta Ha hanya dikuasai oleh sekitar 20 konglomerat besar yang dekat dengan pemerintah. Berbagai pihak merasa sistem ini tidak adil, terutama pengusaha-pengusaha di daerah,

dan yang paling berada pada posisi lemah adalah masyarakat lokal atau adat yang merasa paling termarginalkan dan bahkan tidak memperoleh manfaat dari sistem tersebut. Tingkat kemiskinan penduduk Indonesia masih tetap tinggi, yaitu sekitar 20 persen. Salah satu kelompok masyarakat miskin di Indonesia, khususnya yang berada di luar Pulau Jawa adalah penduduk yang memiliki mata pencaharian sebagai “peladang berpindah.” Kondisi tersebut berdasarkan pada data Bappenas 1994 ketika merumuskan program Inpres Desa Tertinggal (lih. Awang, 2004).

#### **Dinamika Sosial dan Persaingan dalam Pengelolaan Hutan: Kasus Desa Sambi dan Desa Rantau Pulut**

Secara umum, kecenderungan pengelolaan hutan di Indonesia memperlihatkan kepada kita bahwa interaksi negatif dari manusia kepada sumber daya alam, misalnya hutan, lebih dominan dibanding interaksi positifnya. Proses terjadinya “*tragedy of the commons*” di beberapa tempat, merupakan contoh intervensi dan pemanfaatan oleh manusia pada sumber daya alam berupa hutan yang tidak diikuti dengan pengelolaan yang baik dan mempertimbangkan azas kesinambungan, pada akhirnya akan bermuara pada penurunan kualitas sumber daya alam tersebut. Eksploitasi hutan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang merasa memiliki wewenang dalam

pengelolaannya, merupakan faktor yang berkontribusi paling besar pada terjadinya *deforestasi*.

Dalam beberapa tahun terakhir persaingan dalam sektor pengelolaan hutan semakin meningkat, baik antara pemegang HPH/HPHTI yang dianggap sebagai pengelola legal maupun pihak-pihak lainnya yang acapkali berlangsung secara ilegal, serta masyarakat lokal di sekitar hutan yang masih tetap bergantung pada hutan. Fenomena tersebut merupakan sebuah dinamika yang terus berlangsung pasang surut dan melibatkan berbagai pihak dalam sebuah ranah persaingan. Dalam beberapa kasus, dinamika tersebut berujung pada konflik kepentingan. Penduduk lokal yang merasa tidak diuntungkan dalam kegiatan pengelolaan hutan, seringkali melakukan unjuk rasa, penyerobotan lahan, pembabatan hutan, penyanderaan dan bentuk kekerasan lainnya sebagai ungkapan kekecewaan mereka. Berbagai insiden timbul antara masyarakat lokal dengan kepentingan bisnis yang didukung oleh pemerintah, atau bahkan antara sesama masyarakat lokal yang dipicu oleh perbedaan pendapat tentang batas-batas hutan dan pengelolaannya. Setidaknya terdapat empat faktor yang saling berinteraksi dan berpengaruh terhadap kondisi persaingan dan konflik pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, antara lain: faktor sejarah, dinamika masyarakat, politik ekonomi

nasional, dan kebijakan pengelolaan hutan (lih. Suprpto *et all*, 2003).

Berikut gambaran kasus-kasus dinamika sosial, persaingan dan konflik kepentingan dalam pengelolaan hutan yang penulis angkat berdasarkan pengalaman kunjungan ke Desa Sambi dan Rantau Pulut Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2003.

### **Unit Manajemen versus Masyarakat Lokal**

Di Desa-desa Sambi dan Rantau Pulut, terdapat salah satu Unit Manajemen (PT. RE) yang memiliki izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI). Unit Manajemen tersebut telah beroperasi sejak tahun 1992 dengan lahan seluas 18.820 Ha. Pada awalnya sebagian warga desa setempat terserap sebagai pekerja di Unit Manajemen, terutama pada pekerjaan *land clearing*, pemeliharaan bibit tanaman, dan tahap penanaman. Berdasarkan data Unit Manajemen, diketahui bahwa dari 600 orang pekerja, terdapat ± 60 % tenaga kerja yang merupakan penduduk lokal. Sebagian besar dari penduduk lokal tersebut bekerja sebagai buruh harian dan borongan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, muncul tuntutan dari masyarakat lokal yang mengklaim bahwa sebagian dari areal hutan tersebut merupakan tanah ulayat mereka. Tuntutan dan klaim tersebut semakin meningkat sejak tahun 1998 pada saat pihak manajemen mengalami kesulitan keuangan.

Sebelumnya terdapat 45 orang tenaga kerja bulanan, tetapi setelah terjadi kesulitan keuangan jumlah tenaga kerja berkurang menjadi 32 orang.

Penduduk lokal sangat tergantung kepada hutan sebelum hutan di sekitar tempat mereka bermukim dieksplotasi, hingga akhirnya menjadi Hutan Tanaman Industri. Sebagian besar dari mereka telah merubah kebiasaan berladang menjadi pekerja di Unit Manajemen pengelola HTI dan merasa tidak lagi mampu bertahan hidup dari alam yang telah berubah kondisinya. Memasuki awal tahun 2003, klaim penduduk lokal bahwa sebagian areal konsesi Unit Manajemen adalah tanah ulayat mereka, semakin memuncak. Areal pengelolaan Unit Manajemen yang pada awalnya seluas 18.820 Ha, selanjutnya hanya tersisa 10.643 Ha. Pada pertengahan tahun 2003, kegiatan produksi di Unit Manajemen yang bersangkutan telah terhenti total atas tekanan penduduk lokal yang bermukim di sekitarnya.

Di sisi lain, terdapat penambang-penambang emas yang merupakan pendatang dari daerah lain namun tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Penambang-penambang tersebut telah beroperasi beberapa bulan sebelumnya. Mereka telah berhasil mendekati dan membujuk sebagian penduduk lokal agar menyewakan lahan-lahannya untuk dijadikan lokasi penambangan emas. Kehadiran para penambang tersebut

menjadi *income* bagi beberapa penduduk lokal yang menyewakan lahan mereka. Para penambang memposisikan diri sebagai *free riders* dalam dinamika persaingan yang sedang berlangsung. Namun, ironisnya keberadaan tambang-tambang emas menimbulkan pencemaran di sekitar areal hutan dan sungai akibat pembuangan limbah merkuri. Di beberapa tempat bahkan terjadi tanah longsor sebagai dampak dari aktivitas penggalian yang dilakukan oleh para penambang.

#### **Konflik Sesama Masyarakat Lokal**

Semangat otonomi daerah telah mendasari lahirnya pemekaran Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2002 yang kemudian melahirkan Kabupaten Seruyan. Namun, pemekaran tersebut menyisakan persoalan bagi penduduk setempat. Timbul perbedaan pendapat menyangkut batas kedua kabupaten yang terdiri dari areal hutan alam dan hutan tanaman industri yang berada dalam pengelolaan Unit Manajemen (PT. RE). Penduduk Desa Sambi di Kotawaringin Timur dan penduduk Desa Rantau Pulut di Kabupaten Seruyan masing-masing mengklaim berhak atas areal hutan yang terletak di perbatasan kedua desa tersebut. Hal itu didasari oleh motif kedua pihak untuk mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima dari Unit Manajemen pengelola HTI. Dalam pemilihan Ketua RW di salah satu desa

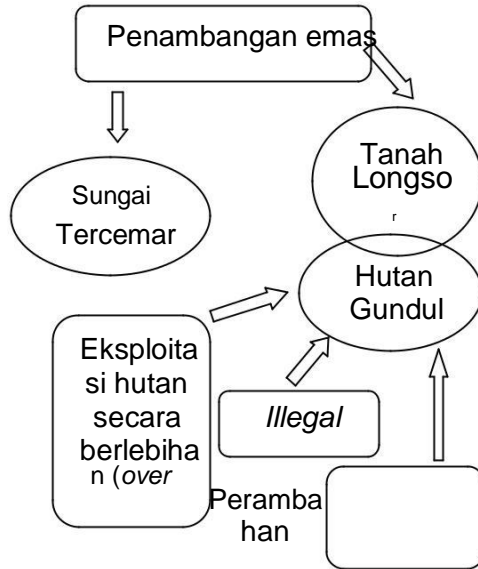
tersebut bahkan sempat terjadi pertikaian antara kedua penduduk desa yang saling berbatasan.

Pada perkembangan selanjutnya, kasus sengketa perbatasan antara Desa Sambi dan Desa Rantau Pulut telah diupayakan untuk diselesaikan melalui pertemuan antara Pemda, penduduk lokal dari kedua desa, dan Unit Manajemen. Namun, penduduk lokal masing-masing desa tersebut belum mencapai kesepakatan atas pembagian kompensasi yang akan mereka terima dari Unit Manajemen.

**Kontestasi yang Berujung pada Degradasi Sumber Daya Hutan**

Bertemunya berbagai pihak yang didasari oleh kepentingan dan motif yang berbeda-beda dalam pengelolaan sumber daya hutan di Kabupaten Seruyan, khususnya di Desa Sambi dan Rantau Pulut, pada gilirannya telah menyebabkan tekanan terhadap hutan. Dinamika sosial yang terus berlangsung dan ditandai dengan persaingan yang seringkali mengarah pada konflik antara berbagai pihak, telah menimbulkan dampak berupa penurunan kualitas sumber daya hutan, antara lain: gundulnya hutan, pencemaran pada areal hutan dan sungai, serta terjadinya tanah longsor di beberapa tempat. Gambaran tentang tekanan terhadap sumber daya alam penting di Kabupaten Seruyan dapat dilihat seperti skema berikut ini.

Gambaran tekanan terhadap sumber daya alam penting di Kabupaten Seruyan



**Penutup**

Gambaran tentang kondisi hutan sebagai salah satu sumber daya alam penting di Indonesia, memperlihatkan kepada kita bahwa antara hutan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya, terutama bagi masyarakat yang sangat menggantungkan sumber mata pencahariannya pada hasil-hasil hutan, tak dapat dipisahkan. Pemisahan batas-batas teritorial hutan untuk kepentingan-kepentingan praktis jangka pendek, atau untuk kepentingan ekonomi yang tidak dilandasi oleh pertimbangan pengelolaan secara lestari dan berkesinambungan,

dalam kenyataannya telah menimbulkan berbagai persoalan.

Keberadaan hutan sebagai perlindungan dan sumber kehidupan bagi penduduk sekitarnya, merupakan fungsi yang sangat penting. Hutan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan kehidupan manusia yang bermukim di sekitarnya karena hutan telah memberi banyak jasa dan kepuasan batin kepada mereka yang menggantungkan kehidupan pada hutan. Kondisi seperti itu seringkali kurang dipahami oleh para pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan. Terjadinya “ *tragedy of the commons*” sebagai dampak dari *over exploitation* terhadap hutan merupakan gambaran yang sesungguhnya telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia dan bahkan masih terus berlangsung hingga saat ini. Siapapun yang mengelola hutan, seharusnya lebih mempertimbangkan aspek multifungsi dari hutan tersebut sehingga pengelolaan hutan dapat berlangsung secara berkesinambungan.

#### Daftar Pustaka

- Awang, San Afri. 2004. *Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan*, Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Feeny, David. 1994. “Frameworks for Understanding Resource Management on the Commons” dalam R.S. Pomeroy (ed.)
- Community Management and Common Property of Coastal in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences*. Manila: ICLARM. Halaman 24.
- Levang, Patrice. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Peluso, Nancy. 1992. *Rich Forest Poor People: Resource Control and Resistance in Java*, Berkeley: University of California Press.
- \_\_\_\_\_. 1994. *The Impact of Social and Environmental Change on Forest Management: A Case Study from West Kalimantan, Indonesia*, FAO Community Forestry case study series no. 8. Rome, Italy : FAO.
- Resudarmo, Ida Aju Pradnja & Colfer, Carol J. Pierce (ed.). 2003. *Ke Mana Harus Melangkah? Masyarakat, Hutan, dan Perumusan Kebijakan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Ruslandi. 2004. *Forest Growth and Dynamics for Sustainable Forest Management in Central Kalimantan, South Central Kalimantan Production Forest Project (SCKPFP)*.
- Simon, Hasanu. 1999. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Cooperative Forest Management): Teori dan Aplikasi Pada Hutan Jati di*

- Jawa, Yogyakarta: Bigraf  
Publishing.
- Suprpto, Edi (ed.). 2003. Konflik  
Hutan Jawa (draft 2),  
Yogyakarta: Arupa.
- [www.eu-ilrc.or.id](http://www.eu-ilrc.or.id). 2005. Kehutanan  
Kalimantan Tengah.
- [www.fwi.or.id](http://www.fwi.or.id). 2005. Update HPH  
Kalimantan Tengah.

## **Kedde Kematian dan Kontestasi Gengsi Tradisi Resiprositas Etnik Wewewa, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur**

Dony Kleden

*Sumba Cultural Research & Conservation Institute  
dan Dosen Antropologi STKIP Weetebula, NTT*

### **Abstract**

*Reciprocity in death kedde traditional ceremony at Wewewa ethnic group in South West Sumba is a tradition that forms and glues the social relations in a collective life. The ceremony is implemented in a contestation which in it consists of wisdom and manipulation. However, reciprocity at a death kedde ceremony becomes the soul or spirit of the community, as the presence of people can be measured or seen from such traditional ceremony. And indeed, such reason makes reciprocity at death kedde ceremony has remain been maintained to date. This writing would like to see the political games behind the reciprocity at death kedde ceremony. It is significant to do since by understanding the reasons behind the festivity, we will be more opened up to comprehend the culture of Wewewa ethnic group. The results of the research shows that death kedde in itself has no single objective but various ones, and each group of kedde procession may has its own objectives depend on their interests and what they like to struggle for with the kedde festivity.*

**Keywords: Kedde, Reciprocity, Wisdom, Manipulation, Wewewa, Sumba Barat Daya**

### **Pengantar**

Di tengah tabuhan bunyi genderang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pekat dan kasat mata, saraf orang-orang modern dipaksa dan dipacuk untuk sebisa mungkin mengikuti perkembangan karena tidak ingin tergilas arus modern atau pun tidak ingin dikatakan sebagai orang-orang yang ketinggalan zaman. Perilaku hidup pun mulai terkikis oleh berbagai kemajuan

karena orang modern cenderung berpikir kalkulatif, untung rugi, apalagi dengan berbagai kemajuan dalam bidang pendidikan.

Namun, anggapan seperti itu ternyata sangat relatif. Faktanya, tidak semua tempat dengan begitu mudah tersihir perkembangan dunia modern semacam itu. Di banyak tempat, ritual-ritual dan upacara-upacara adat masih sangat kuat dan bahkan cenderung dipertahankan,

disterilkan dari sentuhan dan pengaruh modern.

Tradisi resiprositas *kedde* kematian pada etnik Wewewa, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah salah satu tradisi resiprositas yang cukup steril dari sentuhan dan bujukan dunia modern yang kalkulatif. *Kedde* bisa artikan sebagai suatu upaya dari pihak kerabat atau undangan yang datang membawa hewan untuk membantu keluarga yang berduka. Tradisi *kedde* kematian dibuat dalam rangka mempertahankan dan membangun jalinan-jalinan sosial, termasuk berbagai kepentingan lain yang juga sangat kuat terselip di baliknya.

Tradisi tukar-menukar (resiprositas) merupakan kebiasaan yang relatif umum terjadi di banyak tempat. Resiprositas oleh Mauss (1992: xix) diartikan sebagai tukar-menukar yang dilakukan oleh dua orang atau kelompok yang saling mengimbangi. Dalam pemberian yang saling mengimbangi ini, kehormatan dari pemberi dan penerima terlibat di dalamnya. Secara sederhana, resiprositas oleh para ahli diartikan sebagai pertukaran timbal-balik antarindividu atau antarkelompok (Sairin, dkk, 2002: 43).

Dalam tulisan ini, tradisi tukar-menukar tidak dilihat secara *an sich*, tetapi lebih pada apa yang terjadi di balik upacara atau tradisi tukar-menukar itu. Apa yang terjadi di balik pagelaran resiprositas itu menjadi kunci pertarungan kepentingan yang

memungkinkan peristiwa terjadi. Tegasnya dalam tulisan ini, saya menyajikan politik apa yang terjadi di balik layar kontestasi resiprositas itu. Terkait dengan politik, di sini saya melihat bagaimana politik resiprositas digelar dan ritual kontestasi resiprositas dirayakan, baik terkait dengan kearifan maupun manipulasinya.

Dalam konteks ini, bagaimana para aktor resiprositas itu hadir dan berperan dalam sebuah arena peristiwa, dapat dilacak. Kuasa itu mengendalikan dan mempunyai kekuatan untuk menciptakan sebuah arena dengan segala intensinya. Orang yang punya posisi dan kuasa yang dominan seringkali memperjuangkan dan mempertahankan posisinya melalui upacara *kedde*. Tabiat politik yang semacam ini oleh Bailey (1970: 3) disebut sebagai *how to play and how to win*.

Politik pada dirinya sendiri juga membawa serta usaha-usaha dan manipulasi untuk *memperbesar diri* agar seseorang bisa mendapatkan sanjungan dan namanya menjadi buah tutur dalam masyarakat. Pemahaman yang demikian ini sejalan dengan pemikiran Weber (1947: 407- 409) yang mengatakan bahwa upacara-upacara tradisional juga sangat melekat erat dengan prestise seorang pemimpin. Kalau memang demikian, maka upacara, tradisi atau pesta-pesta dalam suatu masyarakat sebenarnya juga sebuah cara yang oleh para pemimpin dan mungkin

juga yang lain digunakan untuk memperoleh kekuasaan. Dalam artian ini, maka kekuasaan oleh Weber (dalam Bendix, 1960: 290) diartikan sebagai kemungkinan seseorang mewujudkan keinginannya di dalam suatu hubungan sosial.

### **Spirit dan Simbol dalam *Kedde***

#### *Kematian dan Undangan Kedde*

Untuk datang melayat, orang harus diundang, apalagi pada hari penguburan. Tanpa undangan, orang tidak akan datang, kendati itu keluarga dekatnya. Akan ada penilaian yang buruk bagi orang yang datang tanpa undangan pada hari penguburan. Orang akan mengatakan “dasar orang itu tidak tahu malu, dia datang tetapi tidak diundang, hanya mencari makan daging saja”. Prinsip yang demikian ini berlaku untuk umum, termasuk tetangga yang bersebelahan rumah pun kalau tidak diundang, dia tidak akan datang.

Pertanyaan yang harus kita ajukan dalam kaitan dengan undangan ini adalah; siapa saja yang wajib diundang atau punya hak untuk diundang dan siapa saja yang bisa diundang dan mengapa mereka perlu diundang? Sebenarnya, undangan itu sendiri bisa dikategorikan dalam tiga kelompok. Termasuk ke dalam kelompok pertama adalah mereka yang terikat hubungan darah dengan orang yang meninggal atau kerabat dari yang meninggal, misalnya paman, ipar atau orang tua atau kemenakan.

Kelompok kedua mencakup kenalan. Kelompok ketiga meliputi “orang-orang kuat” (orang mampu secara ekonomi dan sosial). Jika kelompok pertama bersifat wajib, maka kelompok kedua dan ketiga sifatnya tidak wajib. Mereka diundang entah karena memang sungguh-sungguh meminta bantuan atau karena kepentingan lain yang tersembunyi di baliknya.

Dalam hal undangan, ada juga hal lain yang masih harus dikompromikan. Undangan itu undangan siapa? Pertanyaan ini penting dalam rangka untuk pembalasan di kemudian hari. Misalnya saja, dalam keluarga duka itu ada tiga orang bersaudara. Nanti dalam menentukan undangan, masing-masing menyodorkan nama undangannya masing-masing, entah itu yang membawa hewan atau juga untuk undangan umum yang hanya membawa kain atau amplop. Yang bertugas untuk mencatat pun dia harus bertanya kepada yang datang: “dari mana dan undangan siapa?” Barang bawaan akan dipisahkan menurut pengundang.

Terkait dengan hewan *kedde* yang dibawa, ada aturan tersendiri bagi mereka yang mempunyai hubungan perkawinan. Untuk seorang menantu, ketika orang tua dari istrinya meninggal, dia harus membawa kerbau besar sebagai balas jasa dari istrinya terhadap orang tuanya yang telah melahirkan dan membesarkannya. Hewan yang dibawa tidak boleh dipelihara, melainkan harus dipotong.

Alasannya, hewan ini bukan untuk orang hidup, tetapi untuk dia yang meninggal. Hewan itu menjadi bekal dari anak untuk orang tua dalam kehidupannya yang lain. Dari pihak paman juga berlaku hal yang sama, tetapi dengan alasan yang berbeda. Dia harus membawa kerbau kalau saudara perempuan atau anak dari saudara perempuan (*anakabine*) mereka itu meninggal. Alasannya, hewan itu sebagai simbol cinta mereka terhadap saudara perempuan atau anak-anak dari saudara perempuan dan untuk menjadi bekal dalam perjalanan selanjutnya. Aturan yang demikian ini juga berlaku kepada paman (pihak pemberi perempuan). Orang harus membawa kerbau kalau mau *kedde* ke pihak paman atau *loka* (saudara laki-laki dari ibu). Untuk hubungan-hubungan yang lain, termasuk kenalan, tergantung kompromi dan motivasi.

Sementara untuk *kedde* yang tidak ada hubungan kawin-mawin, hewan yang dibawa tergantung kesepakatan. Kesepakatan itu pun tergantung dari kekuatan kedua belah pihak dan tujuan di balik *kedde* itu. Dalam kaitan dengan ini, orang harus memperhitungkan banyak hal, misalnya terkait dengan *mata api*<sup>1</sup>,

---

<sup>1</sup> Mata api adalah istilah untuk menyebut hewan balasan yang diberikan kepada kelompok atau orang yang melakukan *kedde* (resiprositas tahap pertama). Ukuran hewan mata api itu lebih kecil, dan diberikan sebagai tanda penghargaan. Pada gilirannya nanti ketika orang yang melakukan *kedde* itu mengalami kedukaan, pihak yang sekarang

penjemputan dan *kedde* balasan di kemudian hari. Bapak Tanggu, yang berasal dari sebuah keluarga yang cukup 'terpandang', pada suatu kesempatan membagikan pengalamannya dan mengatakan bahwa beberapa tahun lalu, ketika ayahnya meninggal, banyak orang yang melamar diri untuk *kedde*, tetapi banyak juga yang ia tolak. Dia merasa terlalu berat untuk balasannya di kemudian hari. Mereka memotong delapan ekor kerbau dan enam ekor babi pada hari penguburan saat itu. Ayah dari Bapak Tanggu ini adalah seorang pemuka masyarakat, dan pernah menjadi seorang kepala desa yang dipandang berhasil. Di luar hubungan kawin-mawin, Bapak Tanggu menerima empat *kedde* lamaran, dan mereka yang diterima itu menurutnya adalah yang mengenal ayahnya, khususnya sama-sama dari kalangan pemerintahan. Bapak Tanggu juga mengatakan: "tidak mungkin dia menolak orang-orang dari pemerintahan karena mereka mengenal baik ayah saya". Menurutnya, mereka pasti akan merasa tersinggung kalau dia menolak lamarannya. Mereka orang-orang yang berwibawa tinggi. Menolak lamarannya sama saja dengan menjatuhkan harga diri mereka.

---

menerima hewan *kedde* itu akan membalasnya persis seperti yang dia terima (*balanced reciprocity*), dalam arti ini jenis hewan dan ukurannya harus sama (resiprositas tahap dua).

Cerita ini memberi gambaran bahwa menerima atau menolak *kedde* lamaran itu didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan-pertimbangan khusus. Di dalamnya akan dilihat mana yang lebih menguntungkan dan mana yang tidak. Alasan Bapak Tanggu seperti yang disebutkan di atas bisa juga dilihat secara lain bahwa dia memang lebih mengutamakan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, demi gengsi keluarganya dari pada menerima orang-orang biasa (masyarakat biasa). Intinya adalah bahwa orang yang harus diundang atau berhak diundang pada sebuah *kedde* kematian adalah kalangan yang mempunyai hubungan kawin-mawin seperti: paman, anak menantu, kemenakan, dan ipar. Mereka adalah aktor-aktor utama dalam sebuah pentas resiprositas pada upacara pemakaman.

Terkait dengan pengalaman Bapak Tanggu di atas, pertanyaan bisa muncul: “mengapa Bapak Tanggu menerima orang tertentu khususnya dari pemerintahan dan menolak yang lain?” Dari cerita di atas diketahui bahwa alasannya adalah karena mereka sama-sama dari kalangan pemerintahan, kenalan ayahnya. Tidak baik menolaknya, apalagi jika termasuk orang penting di daerah itu. Ia juga takut jika nantinya ada ketersinggungan dari pihak yang melamar karena mereka merasa kewibawaannya diremehkan.

Jawaban demikian, seperti telah ditunjukkan di atas, mengindikasikan secara kuat bahwa penerimaan pelamar *kedde* juga dalam rangka untuk mempertahankan status dan wibawa dari pihak pelamar itu sendiri. Artinya, menolak pelamar yang lain demi pihak pemerintah yang punya posisi sentral dalam masyarakat adalah alasan dan pertimbangan kunci yang bisa dilihat dalam kasus ini. Dari pihak pelamar sendiri pada momen ini dia akan menunjukkan dirinya siapa dia. Demikian pula sebaliknya dari pihak keluarga duka. Singkatnya, momen ini menjadi ajang pertunjukan kekuatan diri antara pelamar dan yang menerima lamaran.

Kekuasaan yang strategis dalam masyarakat meminta kepatuhan dari orang-orang yang berada di bawahnya. Kekuasaan dari mereka yang punya posisi dalam pemerintahan, dalam cerita *kedde* ini bisa dilihat bahwa karena kekuasaan yang dimilikinya, orang-orang tertentu bisa dengan mudah membangun kepatuhan dan keengganan dari masyarakat untuk menyetujui apa yang hendak dibuat. Filsuf Michel Foucault (Haryatmoko, 2003:219) pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu lahir dari adanya perbedaan atau ketidakseimbangan, dapat dilihat relevansinya dalam kasus *kedde* ini. Perbedaan-perbedaan itu menurut Foucault membentuk garis konfrontasi yang menempatkan yang satu lebih dari yang lain. Mereka yang mempunyai

akses lebih karena kekuasaan yang dimilikinya akan menjadi penentu bagi suatu tindakan.

Ada juga kelompok lain lagi yang *kedde*, tetapi statusnya melamar diri. Dia datang ke rumah duka dan ingin *kedde* pada upacara penguburan. Menurut kebiasaan di Wewewa, hal yang demikian memang agak sering terjadi. Orang yang melamar diri untuk *kedde* itu tentunya punya motivasi tertentu, dan karena itu pihak keluarga harus memperhatikan juga secara khusus, apalagi yang lamar diri itu orang kuat dan punya pengaruh. Orang yang melamar diri untuk *kedde* itu tentu punya motivasi atau kepentingan yang tersembunyi. Jelas bahwa ada motif mencari nama dan harga diri bagi kalangan ini. Meski begitu, tidak tertutup kemungkinan juga kalau ada dari kalangan ini yang memang sungguh-sungguh merasa perlu untuk membantu karena melihat keluarga duka sedang berkekurangan.

Dalam budaya orang Wewewa, para kerabat itu harus diundang. Ini menyangkut ikatan keluarga dan hak dan kewajiban mereka untuk menghormati atau membalas jasa orang yang sudah meninggal. Terkait dengan ikatan keluarga, orang Wewewa mengatakan bahwa justru adanya ikatan keluarga itu yang sangat ditonjolkan pada acara pada acara kematian seperti itu. Jadi orang harus datang atau diundang supaya para undangan juga tahu bahwa mereka ada ikatan keluarga dan juga

supaya ikatan keluarga itu tetap terjaga. Dengan demikian bisa kita lihat bahwa upacara kematian sangat berarti untuk menjaga kerekatan antarkerabat. Ada kontestasi antar- *kabisu* yang terikat oleh perkawinan.

Posisi mereka yang diundang, tetapi tidak ada hubungan darah itu tidak masuk dalam hukum pengambil dan pemberi perempuan. Apa yang dibawa dan apa yang dibalas, bagaimana cara *kedde*, semuanya itu tergantung kesepakatan. Mereka tetap dihargai dan diselempangkan kain dan sarung sebagai tanda penghargaan dan penerimaan, juga sebagai tanda ucapan terima kasih. Bisa dilihat bahwa pada peristiwa yang sama dan dengan cara yang sama, tetapi tujuan bisa berbeda-beda dari masing-masing kelompok yang tergabung dalam upacara itu. Artinya, mereka yang datang untuk *kedde* itu ternyata didorong oleh banyak tujuan.

### **Kompromi dan Rekayasa Politik Resiprositas**

*Kedde* sebenarnya memainkan peranan sangat penting, yaitu: kompromi dan rekayasa politik. *Kontestasi dan Kedde* itu hanya bisa berjalan karena ada kompromi dan rekayasa di dalamnya. Tanpa kontestasi dan *kedde*, akan sangat rentan dengan konflik dan perkelahian. Kompromi menunjuk pada kesepakatan antara kedua belah pihak: pengundang dan

diundang. Rekeyasa menunjuk pada 'pengelabuan' (mengelabui) undangan seolah-olah ada resiprositas yang sesungguhnya, pada hal itu hanyalah sandiwara.

Sejak dahulu, orang-orang di dalam *kedde* selalu duduk kompromi antara yang mengundang dan yang diundang. Kompromi mereka terkait dengan apa yang dibawa pada waktu *kedde* dan apa *mata apinya* (balasan awal) ketika rombongan (*loloka*) *kedde* menginjakkan kakinya di halaman rumah duka dan menerima hewan dari rombongan *kedde*. Kalau soal balasan di kemudian hari terkait hewan bawaan itu, memang sudah jelas, bahwa nanti ketika *kedde* balas, pihak yang sekarang ini menerima hewan dengan besarnya demikian itu akan membalasnya seperti itu juga.

Untuk mencapai sebuah kompromi, antara pihak yang diundang dan yang mengundang, harus duduk mempertimbangkan dan memutuskan hewan apa, besarnya seberapa, panjang tanduknya atau pun juga panjang taringnya, apa *mata api*-nya dan seberapa ramai prosesi dan penerimaannya. Ukuran-ukuran yang demikian ini sangat menentukan penghargaan atau gengsi bagi kedua belah pihak. Kalau hal yang demikian ini tidak diperhatikan dan diabaikan, maka akan menjadi persoalan tersendiri, akan menimbulkan ketersinggungan dan perselisihan, apalagi ada yang merasa

direndahkan dan dipermalukan di depan umum.

Pada poin inilah manipulasi dibuat. Kontestasi yang dipertunjukkan itu sebenarnya adalah sebuah manipulasi. Dasarnya adalah bagaimana supaya antara yang mengundang dan yang diundang sama-sama bisa mengharumkan nama mereka, menaikkan status hidup mereka di tengah masyarakat dengan *kedde* sebagai medianya. Tentang besarnya jumlah rombongan *kedde*, besarnya hewan *kedde* dan jumlah hewan *kedde*, seberapa besar kemeriahan dan apa *mata api*-nya adalah unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah kontestasi. Manipulasi bisa dilihat dalam kontestasi itu sendiri. Orang yang ingin menonjolkan diri, dia akan berada paling depan dalam rombongan *kedde* itu dan menjadi fokus perhatian para undangan. Selain itu juga, bisa diatur supaya rombongan *kedde*-nya bisa menjadi yang paling terakhir ketika semua undangan lain sudah ada, dengan harapan supaya kehadirannya bisa dilihat semua orang. Atau meminjamkan hewan kepada yang diundang supaya dibawa ke tempatnya adalah cara-cara manipulatif dalam kontestasi yang dibuat untuk memperbesar diri di mata masyarakat.

*Setting* politik resiprositas harus diatur sedemikian rupa sehingga pada hari yang ditentukan untuk resiprositas tidak ada yang dikecewakan, dipermalukan atau tidak ada konflik. Maka untuk

menghindari segala kemungkinan yang tidak diharapkan pada hari penguburan, yang mengundang untuk *kedde* itu harus berdiskusi baik-baik tentang semuanya itu. Kompromi yang demikian ini untuk 'mengangkat nama' (prestise) kedua belah pihak. Prinsipnya upacara resiprositas itu harus menguntungkan kedua belah pihak dalam hal nama (Bdk. Weber, dalam Fried, 1967:32). Dalam pemberian yang saling mengimbangi ini, kehormatan dari pemberi dan penerima terlibat di dalamnya (Mauss, 1992:xix).

Penekanan pada kelompok penerima, dalam hal ini keluarga yang berduka adalah; apa yang menjadi *mata api*-nya. *Mata api* ini menjadi ukuran penghargaan bagi mereka yang *kedde*. Besar kecil dan rendah tingginya penghargaan dari keluarga duka terhadap rombongan yang *kedde* dilihat dari besar kecilnya *mata api* yang diberikan. Selain itu juga yang tidak kalah pentingnya pada saat *kedde* adalah penerimaan dalam bentuk tari-tarian dan selempangan kain dan atau sarung. Mengabaikan salah satu dari yang ditentukan ini sama artinya dengan menjatuhkan harga diri di depan banyak orang. Hal ini menjadi mungkin karena resiprositas itu harus terjadi di depan semua undangan.

Namun resiprositas yang demikian ini tidak selalu berjalan mulus. Tidak jarang orang yang diundang itu tidak mempunyai hewan sama sekali untuk *kedde*,

pada hal dia harus melakukan *kedde*, misalnya saja anak perempuan dari orang yang meninggal. Untuk kasus yang demikian ini ada jalan keluar yang dibuat, yang penting pihak keluarga yang merasa tidak mampu itu berterus terang kepada pihak keluarga yang mengundang. Kasus yang demikian ini akan dibuatkan solusinya dengan merekayasa resiprositas. Caranya, pihak keluarga yang mengundang memberikan hewan kepada yang diundang supaya bisa dibawakan pada hari penguburan yang disaksikan oleh semua undangan. Rekayasa yang demikian ini berada di belakang layar dan hanya diketahui oleh pihak keluarga yang mengundang dan yang diundang.

Terkait rekayasa ini orang bisa bertanya, khususnya orang yang dari luar budaya itu sendiri (*outsider*) yang tahu tentang rekayasa ini. Misalnya, mengapa harus ada rekayasa dalam resiprositas yang demikian ini? Tidakkah lebih baik bagi yang diundang untuk mengatakan bahwa dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan berbuat hal lain saja, dari pada harus membuat rekayasa situasi yang demikian itu? Bukankah ini adalah sebuah kepura-puraan dan manipulasi atau sebuah tipuan atau kebohongan terhadap para undangan? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana nanti membalasnya kalau pihak yang diundang mendapat giliran untuk mengundang pada saat ada kedukaan?

Pertanyaan yang demikian ini tidak begitu relevan untuk mereka karena ada hal lain yang menurut mereka lebih tinggi yang diperjuangkan, dari sekedar pemikiran seperti yang ada dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Dan yang mau diperjuangkan di sini adalah "Harga diri, status sosial dan gengsi" dalam masyarakat (Bdk. Weber 1947:409-411). Hal yang demikian ini bisa dimengerti karena bagi orang Wewewa, harga diri, status sosial dan gengsi itu ditentukan dari upacara adat. Artinya, kalau ada kesetiaan pada adat dengan segala tuntutanannya, maka status sosial dan harga diri seseorang tetap ada, semakin tinggi dan dengan demikian dia semakin dihargai di dalam masyarakat.

Sebaliknya kalau tidak setia pada adat maka harga diri dan status sosial akan hilang dan dengan demikian juga dengan sendirinya orang akan tidak lagi dihargai di dalam masyarakat bahkan dikucilkan. Dengan rekayasa yang demikian, pihak yang mengundang "menyelamatkan muka atau mengangkat nama", pihak kerabatnya yang tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak punya hewan. Di lain pihak, pihak yang mengundang, dengan rekayasa yang demikian ini, ia juga mendapat pujian karena masih dihargai oleh kerabatnya yang lain selain jumlah hewan yang terkumpul semakin banyak.

## **Kontestasi                      Resiprositas** **Antaretnis (*Kabisu*)**

*Kedde* sebenarnya juga mempunyai unsur kontestasi. Ini menjadi mungkin karena *kedde* itu sendiri sebenarnya terjadi di antara mereka yang mempunyai keterikatan perkawinan. Maka *kedde* kematian merupakan saat di mana di antara mereka yang punya hubungan karena adanya keterikatan perkawinan itu saling mengunjungi dan membantu. Kalau memang demikian, *kedde* kematian juga bisa dikatakan sebagai sebuah kontestasi antar-*kabisu*. Ini adalah sebuah kearifan dari *kedde* yang sampai sekarang dipertahankan.

Ketika mengikuti sebuah *kedde* kematian, saya mencoba untuk mengikuti segala persiapan mereka, mulai dari awal, sebelum keberangkatan. Setelah semua persiapan dilihat beres dan yang ikut dalam rombongan *kedde* sudah lengkap, kini rombongan mulai beranjak menuju rumah duka pada pukul 9.30 wita. Jalannya lumayan jauh dan kondisi jalan yang tidak bagus membuat kami harus hati-hati untuk menghindari kecelakaan. Urutan prosesi *kedde* sebagai berikut; sepeda motor di depan, setelah itu mobil *avansa* dan *pick up* dan paling terakhir adalah truk yang membawa kedua kerbau. Sepanjang jalan, bunyi gong dan tambur terus berkumandang dan sorak-sorai terus terdengar memecah kesunyian dan mengundang perhatian. Bunyi klakson dan tarikan gas sepeda

motor yang bervariasi pun terus memberi suasana tersendiri.

Sekitar jarak lima ratus meter dari halaman rumah duka, kami semua berhenti di sebuah lapangan bola kaki untuk menurunkan kerbau dari truk, dan semua anggota kelompok *kedde* berjalan kaki menuju rumah duka, kecuali yang bersepeda motor. Jumlah yang tergabung dalam rombongan *kedde* ini 38 orang. Bunyi raungan sepeda motor dan klakson terus saja mengiringi perjalanan yang lamban menuju rumah duka. Rombongan sepeda motor ini boleh dikatakan sebagai tanda pemberitahuan kepada yang berduka bahwa ada kelompok *kedde* yang sedang menuju ke tempat duka.

Beberapa kali mereka mondar-mandir di depan rumah duka dengan berbagai atraksi sampai-sampai ada yang terjatuh. Merupakan panorama yang menarik perhatian tersendiri kalau dalam atraksi sepeda motor itu ada yang sampai terjatuh. Ngongo, salah satu keluarga dekat dari informan kunci yang mengatakan, kalau ada yang jatuh dan terluka dalam atraksi motor itu, maka dia harus menyerahkan (membuang) pedangnya ke rumah duka dan dari rumah duka harus memberinya sebuah kain untuk mengangkat jiwanya. Menurutnyapun, kalau sampai yang jatuh itu terluka dan tidak membuang (menyerahkan) parangnya kepada rumah duka dan dari rumah duka juga tidak memberinya selembar kain, maka yang bersangkutan harus

pulang ke rumah dan membuat ritual (berdoa) memohon keselamatan. Jika hal yang demikian ini tidak dilakukan, kata bapak Ngongo, maka petaka akan terus mengikutinya dan ia akan mengalami banyak peristiwa tragis.

Fenomena ini membuat para 'pelayat' semakin menjadi-jadi untuk bersorak gembira, sementara ada yang tertawa lepas sambil memberi semangat untuk bangun lagi. Fenomena lain yang juga cukup menarik perhatian adalah bahwa anak-anak sekolah dasar yang kebetulan gedung sekolahnya di pinggir jalan yang akan dillewati rombongan *kedde*, bersama guru dan pegawainya ikut berhamburan keluar ruangan hanya untuk melihat prosesi *kedde*. Memang jarak antara rumah duka dengan sekolah hanya beberapa meter saja. Namun ada pertanyaan yang sempat muncul dalam benak; ada apa dengan *kedde* dan semenarik apa dia sehingga yang sedang belajar di kelas saja bisa berhenti sejenak supaya bisa melihatnya?

Kemeriahan kontestasi upacara *kedde* ini menjadi tontonan yang menarik. Semua yang ada di sekitar rumah duka, termasuk yang sedang menjaga jenazah pun dalam penglihatan berusaha untuk melihat siapa yang datang *kedde*, hewan apa dan sebesar apa yang dibawa. Tontonan yang demikian ini mempunyai arti tersendiri bagi yang membawa hewan (yang *kedde*) dan bagi keluarga duka. Terkait dengan soal ini, pada suatu kesempatan

saya mengikuti sebuah upacara penguburan seorang ibu yang bernama Depa (bukan nama sebenarnya). Pada saat ibu Depa meninggal, ada orang yang terkemuka dalam masyarakat mengirim utusannya ke rumah dan mengatakan bahwa dia mau *kedde* dengan seekor kerbau dengan ukuran sekian pada hari penguburan nanti.

Ketika mereka mendengar lamaran orang yang dipandang sebagai punya kekuatan dalam masyarakat itu, pihak keluarganya segera membuat pertemuan kilat untuk memutuskan apakah diterima atau tidak, dan kalau diterima, *mata api* apa yang akan diberikan kepada orang itu serta bagaimana menerimanya. Singkatnya hasil dari pertemuan itu memutuskan menerima lamaran *kedde* itu. Alasan penerimaan menurut Roman, tidak beda jauh dengan yang juga diberikan oleh Bapak Tanggu pada cerita sebelumnya. Menurut cerita Roman, keluarga duka itu mendapat banyak simpati dan banyak yang ingin *kedde* untuk ibu Depa tetapi pihak keluarganya berkeberatan karena tidak mau terlalu banyak beban utang di kemudian hari. Keluarganya lalu memutuskan untuk menerima beberapa *kedde* kerbau dan babi untuk menambah jumlah hewan.

Alasan penerimaan dan penolakan yang diungkapkan Roman ini memberikan pemahaman tersendiri. Terhadap elit lokal, mereka tidak bisa menolaknya.

Walapun Roman tidak mengungkapkan bahwa penerimaan itu terkait dengan gengsi kedua belah pihak, namun sebagaimana juga yang dialami oleh Bapak Tanggu pada cerita sebelumnya, kita menangkap ada suatu motivasi yang lain bahwa, mereka ingin mendukung para elit lokal dalam usahanya untuk memperbesar diri yang tentunya juga keluarga duka akan mengalami yang sama bahwa mereka juga akan mendapat pujian karena ada elit lokal bisa hadir dalam upacara mereka. Antara elit lokal dan keluarga duka, kedua belah pihak sama-sama besar di depan penonton.

Strategi politik yang demikian inilah yang diciptakan supaya gengsi dan status sosial mereka tetap terjaga. Dari pihak para elit lokal, moment *kedde* kematian yang demikian ini sangat berarti, karena pada saat ini ada dua alasan bisa sekaligus diperlihatkan. Pertama, dengan hadirnya para elit lokal pada upacara penguburan ini, para undangan dan 'penonton' akan memberikan simpati kepadanya sebagai seorang 'pemimpin' yang merakyat, seorang pemimpin yang mempunyai empati besar terhadap kesusahan rakyatnya. Dengan demikian dia akan semakin dikagumi dan itu sebenarnya dia sedang menggalang massa. Kedua, dengan hadirnya elit lokal pada upacara penguburan ini, dia sebenarnya ingin menunjukkan diri sebagai seorang pemimpin, dia sedang mensosialisasi diri kepada rakyatnya. Politik sosialisasi diri ini sangat

penting karena masyarakat hanya bisa memberikan simpati kepada pemimpin yang mereka kenal, apalagi pada upacara penguburan itu seorang pemimpin diberi kesempatan untuk berbicara.

Yang menarik adalah bahwa *kedde* para elit lokal itu biasanya menjadi *kedde* yang terakhir setelah semua yang lain. Alasan yang saya dapatkan dari Roman adalah, supaya mereka tidak terlalu menunggu lama. Namun alasan yang demikian ini sedikit berbeda dengan alasan yang diberikan ibu Tanti yang mengatakan; “biasanya begitu, kalau ‘orang besar’ *kedde*, dia biasanya diminta untuk datang paling terakhir setelah semua undangan dan yang *kedde* hadir. Kehadiran ‘orang besar’ pada peristiwa yang seperti ini akan membuat orang sangat senang dan kagum”.

Menjadi orang yang paling terakhir masuk dalam sebuah arena seperti para elit lokal dalam cerita ini kiranya merupakan bagian dari sebuah strategi dan manipulasi kontestasi dari kedua belah pihak untuk menggalang simpati masa dan dukungan bagi ‘orang besar’ dan kebanggaan bagi kedua belah pihak. Dengan peristiwa ini, kedua belah pihak bisa menjadi besar dan nama mereka semakin nyaring. Arena resiprositas dan strategi yang diciptakan ini menjadi wadah yang sangat tepat bagi kedua belah pihak untuk membangun citra diri dan gengsi. Para elit lokal dengan rombongannya, dan keluarga duka adalah aktor-aktor yang tengah

memerankan sebuah permainan. Arena resiprositas (halaman tengah yang dikelilingi oleh para undangan) adalah panggung pentas yang memungkinkan kedua belah pihak menunjukkan diri dan perannya masing-masing.

Ketika memasuki kintal keluarga yang sedang berduka, rombongan *kedde* akan dijemput dengan tarian. Tarian penjemputan itu sangat punya arti bagi mereka yang melakukan *kedde*. Orang akan sangat tersinggung kalau tidak disambut dengan tarian, karena menurut mereka tarian itu sendiri adalah lambang penghargaan terhadap rombongan yang melakukan *kedde*. Orang akan keluar dari halaman (arena) duka dan pulang atau setidak-tidaknya akan terjadi konflik kalau tidak ada tarian penjemputan. Ini adalah sebuah kontestasi yang di dalamnya terkandung penghargaan, solidaritas dan gengsi.

Kemeriahan atau kontestasi prosesi *kedde* itu sangat dibutuhkan, baik untuk pihak yang *kedde* maupun untuk keluarga duka itu sendiri. Ini semua dalam rangka pamer diri dan menunjukkan siapa dia dan seberapa kuat dia, apalagi dengan *lero* (kain yang dipakai sebagai semacam spanduk untuk menunjukkan kekuatan seseorang). Kemeriahan kontestasi ini sangat penting dalam rangka mendapatkan pengakuan. Kemeriahan kontestasi itu juga akan dibalas oleh keluarga duka di kemudian hari. Artinya, kalau dulu saya *kedde* kamu dengan

membawa motor, bedil dan sensor, maka kamu juga harus *kedde* saya dengan kemeriahan yang semacam itu. Inilah yang disebut sebagai *balanced reciprocity* (Sahlins, 1974: 194). Ini dalam rangka kita saling menghargai dan saling 'angkat nama'.

Kemeriahan prosesi (kontestasi) ini juga masuk dalam sebuah strategi dan manipulasi yang harus dirancang sebaik mungkin untuk menunjukkan diri. Hal ini sangat penting karena kemeriahan prosesi itu mempunyai daya tarik yang luar biasa untuk masyarakat Sumba, teristimewa di daerah

Wewewa. Orang-orang yang mendengar bunyi dan teriakan kemeriahan akan berusaha untuk melihat siapa yang lewat dan apa yang dibawa dalam *kedde* itu. Dengan kerumunan massa di sepanjang jalan yang menyaksikan prosesi *kedde* yang adalah sebuah kontestasi sesungguhnya itu dalam rangka pengagungan diri (prestise). Dalam konteks ini maka benarliah kata Weber (dalam Fried, 1967:32), bahwa prestise adalah suatu faktor yang *real* dan penting yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dan yang sangat terkait dengan status.

### **Kearifan Resiprositas dan Usaha Mempertahankannya**

Pertanyaan awal untuk menemukan kearifan yang terkandung dalam resiprositas pada upacara kematian adalah; mengapa dalam jaman yang begitu modern, dunia yang sangat mengagungkan

nilai materi sehingga perhitungan untung rugi selalu menjadi ukuran untuk berbuat sesuatu, tetapi orang Wewewa tidak menghiraukan nilai materi tersebut ketika tengah mengadakan upacara penguburan dengan mengorbankan banyak hewan? Apa yang hendak mereka perjuangkan atau tunjukkan dengan upacara semacam itu?.

Resiprositas pada upacara pemakaman di Etnik Wewewa mempunyai kedalaman arti yang tidak selalu dipahami oleh orang yang berada di luar komunitas mereka. Ada tiga hal yang dalam temuan saya menjadi alasan mengapa mereka begitu bersikukuh untuk mempertahankan upacara resiprositas yang terwaris di tengah gempuran budaya modern yang menawarkan berbagai kemungkinan dan kemudahan tidak terkecuali bagaimana supaya hidup lebih realistis dan hemat.

*Pertama*, resiprositas pada upacara kematian menjadi sarana untuk penegasan diri bagi yang mengundang dan yang diundang. Artinya dengan adanya resiprositas itu, seseorang bisa menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakatnya. Dengan demikian seseorang akan diterima, dihargai dan menjadi bagian dari masyarakatnya. Kalau ia tidak mengadakan atau terlibat dalam resiprositas pada upacara pemakaman atau berusaha sedapat mungkin untuk menghindarinya, ia akan dianggap sebagai yang tidak tahu adat bersama dan karena itu dia

pun tidak punya hak untuk dihormati atau dihargai dalam kehidupan bersama, bahkan dia akan dikucilkan.

*Kedua*, resiprositas pada upacara kematian mempunyai fungsi untuk merekatkan relasi kekerabatan dan sosial. Bagi orang Sumba dan Etnik Wewewa pada khususnya, upacara-upacara adat termasuk pemakaman menjadi saat yang tepat untuk saling mengunjungi, saling membantu dan mempererat hubungan kekerabatan atau kekeluargaan. Bagi orang Wewewa, tidak ada peristiwa lain yang bisa dijadikan alasan untuk membangun dan mempererat hubungan kekerabatan selain dalam dan melalui upacara-upacara adat. Peristiwa resiprositas pada upacara pemakaman menjadi saat di mana di antara kaum kerabat yang satu dengan yang lain bisa saling membagi, membantu dan balas jasa.

*Ketiga*, resiprositas pada upacara pemakaman juga mempunyai arti eskatologis. Artinya resiprositas itu dalam rangka kebahagiaan orang yang meninggal di dunianya yang lain. Banyaknya hewan yang dikorbankan pada waktu upacara penguburan sesungguhnya tidak sekedar untuk dibagikan kepada para undangan atau hanya sekedar untuk menaikkan gengsi, tetapi juga untuk melapangkan jalan orang yang meninggal ke peristirahatan yang terakhir (*wanno kalada*). Hewan yang dipotong pada waktu upacara pemakaman diyakini sebagai bekal

bagi orang yang meninggal. Dia akan hidup sengsara kalau pada waktu upacara penguburan tidak ada hewan yang dikorbankan. Atau dia akan menduduki tempat yang sangat rendah di kehidupan yang lain kalau tidak ada bekal yang dibawa, dalam hal ini tidak ada hewan yang dipotong.

Terhadap ketiga kesimpulan ini, pendapat Mauss (1992) bisa mendapatkan relevansi dan pijaknya bahwa tukar- menukar dipahami sebagai sebuah transaksi moral yang menghidupkan dan mempertahankan hubungan-hubungan manusiawi. Tukar- menukar adalah sebuah ungkapan rasa saling tergantung dan saling membutuhkan satu sama lain. Inilah sebuah kearifan yang tetap terpelihara yang mendorong mereka untuk terus mempertahankan tradisi itu selain adanya usaha-usaha pencarian status dan gengsi

## Penutup

Tradisi resiprositas pada upacara pemakaman yang dilakukan di Sumba Barat Daya merupakan media untuk mempertahankan status sosial ataupun untuk menaikkan status sosial dan gengsi dalam masyarakat. Hal yang demikian ini menjadi mungkin karena, untuk orang Sumba Barat Daya, ukuran untuk menentukan harga diri, gengsi dan status sosial itu ada pada upacara dan pesta adat. Maka sangat tepat apa yang dikatakan oleh Bapak Johan: *Orang Cina itu mati karena*

*uang, tetapi kami orang Sumba mati karena nama. Demikian juga dengan apa yang dikatakan Bapak Lende: Kami orang Sumba ini besar di mata adat.*

Resiprositas pada upacara pemakaman menjadi satu sarana untuk mendongkrak dan mempertahankan harga diri, gengsi dan status sosial. Kalau memang demikian, kita bisa mengatakan bahwa makna dan tujuan yang terkandung dalam resiprositas itu adalah untuk membangun rasa solidaritas antar *kabisu* atau kerabat dan juga untuk mencari sebuah ukuran diri dalam masyarakat yakni gengsi dan status sosial.

Hewan yang dibawa pada waktu *kedde* dan *mata api* yang diterima, hewan balasan, tarian dan kemeriahan *kedde*, mendapat kesempatan untuk membantai hewan, menerima daging hewan bantaian adalah bentuk dan simbol yang di dalamnya terkandung banyak pesan dan yang terutama adalah harga diri antara yang melakukan *kedde* dan keluarga duka yang mengundang orang untuk *kedde*. Berbagai kepentingan yang ada di balik upacara kematian menjadi mesin penggerak yang terus menggelinding dan menghidupkan *anima* masyarakat untuk terus mengadakan upacara tradisi resiprositas pada upacara kematian.

Dalam hal undangan pun, khususnya untuk mereka yang dimintakan membawa hewan *kedde*, pihak keluarga harus berunding baik-baik, tentang siapa yang diundang

dan mengapa orang itu harus diundang. Dalam berunding untuk menentukan siapa-siapa yang harus diundang dan siapa yang harus membawa hewan apa, sesungguhnya dilatarbelakangi oleh motivasi -motivasi atau kepentingan. Dengan kata lain, harus dipastikan bahwa orang yang diundang itu benar-benar bisa memberikan sesuatu, bahwa dengan kehadirannya, dia bisa memberikan nilai plus yang bisa mengangkat harga diri dan status sosial mereka.

Proses komprominya pun harus dilalui dan harus dipastikan dengan jelas antara yang mengundang dan yang diundang. Komprominya itu seperti; hewan apa yang akan dibawa dan besarnya seperti apa? *Mata api* apa yang bisa menjadi balasannya?. Seberapa besar rombongan dan kemeriahan kontestasinya, bagaimana cara penerimaan dan kapan rombongan *kedde* itu bisa datang?. Kompromi-kompromi semacam ini sangat penting sehingga apa yang diperjuangkan di balik semuanya ini bisa tercapai dan tidak ada konflik pada hari yang ditentukan itu.

Dalam arti ini, yang jelas bahwa masing-masing orang yang terlibat di dalamnya bisa mempunyai kepentingan dan motivasi yang berbeda. Pihak om, kemanakan, anak mantu, kenalan, undangan biasa, ipar, orang yang punya status sosial tinggi dalam masyarakat, bisa mempunyai kepentingan yang berbeda pada peristiwa yang sama. Mereka-mereka yang terlibat dalam

resiprositas ini diundang atau melamar diri untuk melakukan *kedde* mempunyai motivasi yang bisa beragam. Dengan kata lain resiprositas pada *kedde* kematian tidak mempunyai tujuan tunggal. Kalau memang demikian, maka bisa dikatakan pula bahwa resiprositas pada upacara pemakaman adalah sebuah arena 'kompetisi'.

Persoalan yang juga harus dimunculkan dalam konteks ini adalah mungkinkah ada kearifan yang terdapat pada tradisi resiprositas pada upacara pemakaman itu? Pertanyaan ini sebenarnya mau menggali apa kandungan terdalam lain dari tradisi resiprositas itu sendiri, yang sebenarnya juga menjadi salah satu tujuannya dari tradisi resiprositas. Kandungan lain dari tradisi resiprositas itu adalah rasa solidaritas, empati, merekatkan hubungan kekerabatan dan ingin sama-sama saling menjaga nama baik. Ini adalah salah satu tujuan luhur dari tradisi resiprositas pada upacara pemakaman Etnik Wewewa. Ini adalah satu kearifan dari tradisi resiprositas yang terjadi di Etnik Wewewa.

Di tengah kehidupan dunia modern yang begitu terbuka dengan semangat ingin lepas bebas dari berbagai keterikatan budaya dan juga penuh dengan perhitungan untung rugi dalam bertindak, tradisi resiprositas pada upacara pemakaman di Etnik Wewewa masih tetap bertahan dan dilestarikan. Tradisi resiprositas pada

*kedde* itu bisa bertahan disebabkan oleh beberapa alasan sebagai berikut; *Pertama*, tradisi resiprositas pada upacara kematian menjadi sarana untuk penegasan diri bagi yang mengundang dan yang diundang. Artinya dengan adanya resiprositas itu, seseorang bisa menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat. Dengan demikian seseorang akan diterima, dihargai dan tetap menjadi bagian dari masyarakatnya.

*Kedua*, tradisi resiprositas pada upacara pemakaman mempunyai fungsi untuk merekatkan relasi kekerabatan dan sosial. Dan yang *ketiga* adalah, Resiprositas pada upacara pemakaman juga mempunyai arti eskatologis. Artinya resiprositas itu dalam rangka kebahagiaan orang yang meninggal di dunianya yang lain. Banyaknya hewan yang dikorbankan pada waktu upacara penguburan sesungguhnya tidak sekedar untuk dibagikan kepada para undangan atau hanya sekedar untuk menaikkan gengsi, tetapi juga untuk melapangkan jalan orang yang meninggal ke peristirahatan yang terakhir (*wanno kalada*).

Perlu ditegaskan lagi bahwa, semua simbol yang ada selama terjadinya resiprositas dengan segala kontestasinya pada upacara pemakaman, sebenarnya ada dan muncul dari sebuah kompromi. Kompromi ini sangat penting untuk memastikan, sejauh mana antara pihak yang mengundang dan diundang itu saling menghargai satu

sama lain, saling 'angkat nama' dan status sehingga kehidupan sosialnya bisa aman dan diterima. Segala rekayasa teristimewa ketika salah satu kerabat yang seharusnya membawa hewan dalam *kedde* tetapi tidak bisa karena persoalan ekonomi, semuanya itu dalam rangka membuat diri aman di mata masyarakat. Harga diri, status sosial, gengsi, semuanya itu hanya bisa ada dan aman kalau, seseorang mampu menjalani kewajiban-kewajiban adatnya. Ungkapan Bapak Lende bahwa; *Orang Sumba besar di mata adat*, kiranya menjadi salah satu simpul dari berbagai usaha untuk memenuhi segala tuntutan adat.

Sebagai kesimpulan dari tulisan ini yang merupakan hasil penelitian; saya pun pada akhirnya mengatakan bahwa; Resiprositas pada upacara kematian Etnik Wewewa, Sumba Barat Daya, adalah sebuah kompetisi dan pertarungan gengsi. Kalau memang demikian dapat dikatakan pula bahwa prosesi dan kontestasi *kedde* pada upacara pemakaman adalah sebuah prosesi dan kontestasi gengsi. Penulis mengatakan itu sebagai sebuah prosesi atau kontestasi gengsi karena kontestasi dengan segala kemeriahan itu sesungguhnya dengan maksud untuk menarik perhatian massa atau khalayak supaya massa atau khalayak itu bisa melihat siapa yang sedang lewat dan apa yang dibawa. Pengakuan massa dengan segala puja-pujinya adalah sasaran yang dibidik dari kemeriahan kontestasi *kedde* yang

semuanya itu bermuara pada harga diri dan status sosial. Tentu di sana juga ada unsur kontestasi antar kabisu (etnik) dalam rangka mempertahankan hubungan-hubungan sosial, di mana di dalam kontestasi itu ada ungkapan solidaritas yang mau ditunjukkan. Tetapi yang sangat menyolok dari kontestasi ini adalah gengsi dan status sosial.

Dan yang dipertukarkan dalam upacara pemakaman ini adalah gengsi. Dengan mengatakan demikian penulis tidak bermaksud untuk menghilangkan rasa empati dan simpati atau pun solidaritas yang merupakan sebuah kearifan, tetapi yang sangat menonjol adalah gengsi, cari nama dan status sosial.

## Refleksi

Budaya selalu dalam proses perubahan. Dalam arti ini dapat dikatakan pula bahwa budaya adalah sesuatu yang dikonstruksi. Dan karena budaya adalah sesuatu yang dikonstruksi, maka ia selalu memetamorfosis dalam cara dan bentuk baru sebagai sebuah adaptasi. Terus berubah dan beradaptasi adalah unsur yang sangat substantif dari budaya itu sendiri.

Di lain pihak, budaya juga tidak bisa dinilai dalam kualifikasi baik dan buruk, karena baik buruk itu pun sangat relatif. Mengatakan budaya itu baik dan yang ini buruk atau kurang baik sama artinya dengan merendahkan kehidupan sekelompok orang yang hidup

dalam budaya tersebut. Budaya apa pun dan di mana pun, di sana selalu ada dalam dirinya terkandung nilai-nilai keluhuran yang diperjuangkan dan dipertahankan.

Tradisi resiprositas pada *kedde* kematian adalah sebuah budaya Etnik Wewewa yang juga punya nilai-nilai luhur dan kearifan yang diperjuangkan dan dipertahankan. Di balik segala kemeriahan upacara *kedde* yang menimbulkan kesan pemborosan, sesungguhnya di sana ada nilai-nilai unggul yang mau diperjuangkan atau dipertahankan. Maka untuk membaca dan memahami arti dan pentingnya sebuah budaya dengan segala ritualnya, dalam diri seseorang dituntut untuk mempunyai sikap menghargai sebelum memberi penilaian. Dengan mempunyai sikap yang menghargai, seseorang dapat lebih terbuka untuk masuk ke kedalaman diri para pelaku budaya dan bisa menangkap arti di balik semua itu.

Tradisi resiprositas pada *kedde* kematian di Etnik Wewewa Sumba Barat Daya yang seringkali menjadi area konflik, misalnya antara pemerintah dan masyarakat atau juga antara gereja dan masyarakat dengan alasan pemborosan dan penghamburan kekayaan yang memiskinkan, hendaknya ditanggapi secara bijak. Dan sebuah sikap yang bijaksana hanya bisa diambil kalau pihak yang kontra dengan budaya itu sudah memahami dengan sungguh arti dan pentingnya *kedde* kematian itu. Tanpa

memahami dan mengerti tradisi ini, segala kebijakan yang diambil termasuk membatasi segala kemeriahan hanya akan menimbulkan konflik dan ketidakadilan, selain pelecehan.

#### Daftar Pustaka

- Bailey, F.G. 1970. *Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics*. Oxford: Basil Blacwell
- Bendix, Reinhard. 1960. *Max Weber: An Intellectual Portrait*. Doubleday & company, New York
- Ekeh, Peter P. 1974. *Social Exchange Theory*. Heinemann, London
- Fried, Merton H. 1967. *The Evolution of Political Society*. Random House, New York
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Kompas, Jakarta
- Mauss, Marcel. 1992. *Pemberian* (terjemahan). Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Sahlins, Marshall. 1974. *Stone Age Economics*. Tavistock Publication, London
- Sairin, Sjafrin, Sumedi, Bambang Hidayana. 2002. *Pengantar Antropologi Ekonomi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Weber, Max. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press.